

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Uraian Benturan kepentingan	Pejabat/ pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan	Keterangan
1	Pemanfaatan aset BMN yang tidak sesuai peruntukan, alokasi BMN yang seharusnya diperuntukkan untuk menunjang tugas jabatan dipakai oleh keluarga atau digunakan untuk kepentingan lain di luar urusan dukungn pelaksanaan tugas yang cenderung berpotensi digunakan di luar tusi antara lain kendaraan, laptop, handphone, printer, scanner, lcd, dan perangkat perkantoran lain termasuk penggunaan sarana kantor untu[k keperluan bukan dinas yang dila[kukan di luar standar penggunaan yang dibenarkan oleh peraturan.	Semua pegawai	1. Penggunaan aset oleh pihak lain 2. Penggunaan di luar kepentingan dinas (misalnya untuk usaha/bisnis)	1. Perlu SOP dan monev secara periodik untuk pemeriksaan penggunaan BMN 2. Pembuatan komitmen dari pengguna	
2	Pengangkatan atau pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, objektif, dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk-bentuk afiliasi tertentu saudara, kenalan atau afiliasi yang lain).	Semua pegawai	1. Hubungan afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Proses rekrutmen secara terbuka dan transparan dan didokumentasikan	
3	Penentuan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan individu dan golongan, sehingga penentuan anggaran tidak berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan	Pejabat struktural	Adanya pemberian gratifikasi atau hubungan afiliasi	1. Monev terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran secara berkala 2. Keputusan dan penentuan lokasi anggaran dibahas semua <i>stake holder</i> dan didokumentasika n	
4	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak efektif dan efisien. Mekanisme penileian penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan	Pejabat pengadaan PPK KPA Bendahara PPSM	Gratifikasi Afiliasi/kedek atan	1. Keterbukaan mekanisme pengadaan 2. Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat	
5	Pada proses seleksi peserta pelatihan ada kemungkinan cara penetapan peserta yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan	KKLP Penyuluhan KKLP UKBI	Hubungan afiliasi dengan calon peserta Adanya unsur balas budi, gratifikasi	Menetapkan kriteria peserta diklat sesuai dengan kriteria dan disepaki dan disahkan bersama	
6	Bias dalam pemilihan narasumber pada kegiatan yang membutuhkan narasumber dari luar instansi	Kepala KKLP Penyuluhan KKLP UKBI	Hubungan afiliasi atau gratifikasi	Melakukan dokumentasi kertas kerja pemilihan narasumber	

7	Penyalahgunaan jabatan	Pejabat struktural, PPK, bendahara, pejabat pengadaan Barang/Jasa, Pejabat penerima hasil pekerjaan	Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung	Penandatanganan pakta integritas yang isinya sesuai dengan kode etik	
8	Penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepada kepentingan pribadi/golongan	Pejabat terkait	Alasan kepentingan pribadi Alasan penyerapan anggaran	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel	